

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) dan Opsen Pajak terhadap pendapatan daerah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif komparatif melalui analisis time series, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari laporan realisasi anggaran tahun 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan daerah pada semester I tahun 2024 sebesar 1,40%, sedangkan kontribusi opsen pada semester I tahun 2025 hanya sebesar 0,88%, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52%. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, jumlah kendaraan yang relatif kecil, serta masih banyaknya kendaraan yang terdaftar di luar Kota Padang Panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan opsen pajak belum memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan skema DBH, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi basis pajak daerah.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil, Opsen Pajak, Pendapatan Daerah, PKB, BBNKB

SUMMARY

This study analyzes the effect of Revenue Sharing Funds (Dana Bagi Hasil/DBH) and tax surcharges (Opsen) on the regional revenue of Padang Panjang City before and after the implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments. Using a quantitative descriptive-comparative approach with time-series analysis, this research employed secondary data from budget realization reports of 2024–2025. The results show that the contribution of DBH from Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) to regional revenue in the first semester of 2024 was 1.40%, while the contribution of tax surcharges in the first semester of 2025 was only 0.88%, indicating a decline of 0.52%. This decrease was mainly due to low taxpayer compliance, the relatively small number of registered vehicles, and administrative registration of vehicles outside Padang Panjang. The study concludes that the implementation of tax surcharges has not yet provided greater revenue compared to the DBH scheme, highlighting the need for strategies to improve taxpayer compliance and optimize the local tax base.

Keywords: Revenue Sharing Funds (DBH), Tax Surcharges (Opsen), Regional Revenue, PKB, BBNKB